

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM DI SEKOLAH AL-KHUSYU DESA TUGUREJO KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR

Fajar Trianto¹, Nurul Umi Ati², Agus Zainal Abidin³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl.
MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
E-mail: fajar.triant@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya kesenjangan pelaksana terhadap implementasi kebijakan kurikulum sekolah yang cenderung lemah dan tidak konsisten. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut Sekolah Al-khusyu' di Kec. Wates Kab. Blitar melakukan pengembangan kebijakan berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai bahan implementasi kebijakan hingga tahun-tahun mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan kurikulum dalam meningkatkan layanan pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk mengetahuinya maka digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran data online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran implementasi kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Kebijakan (KTSP) sudah terealisasi dengan baik. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu Kab. Blitar adalah kebijakan pimpinan membuat kurikulum dan sumber daya finansial. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar adalah sumber daya Manusia (pelaksana) dan mutu tenaga pendidik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kurikulum

Pendahuluan

Kurikulum merupakan suatu elemen strategis yang ada dalam sebuah layanan program pendidikan dan komponen pendidikan yang menjadi acuan standar layanan pendidikan terhadap pihak-pihak yang berada dalam penyelenggaraan program atau satuan pendidikan, baik sebuah program yang dilakukan oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh tenaga pengajar/jajaran guru dan kepala sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 36 ayat (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar Nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Munculnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan yang bersifat sentralistik yaitu penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara penuh kepada

pemerintah pusat. Kemudian berubah ke pendidikan desentralistik yang dilatar belakangi oleh perubahan dan beberapa tuntutan masyarakat dalam dimensi global.

Rata-rata kemampuan berpikir individu anak Indonesia secara ilmiah dianggap masih dibawah standar. Menurut hasil dari studi lembaga survei pendidikan International, *Trends In International Mathematic and Science Study (TIMSS)* dan *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)* 2011 dalam hasil perhitungannya menunjukkan tidak adanya perkembangan yang signifikan terhadap kemampuan siswa-siswi di Indonesia.

Hasil studi TIMSS pada tahun 2007 dan 2011 menunjukkan kemampuan siswa-siswi Indonesia dalam perhitungan matematika tidak ada peningkatan. sebagian besar siswa-siswi Indonesia kesulitan dalam mengerjakan soal mulai dari menengah ke atas, dikarenakan adanya perbedaan antara bahan ajar standar nasional

dengan yang di ujikan tingkat internasional, begitu pula yang terlihat dalam bidang sainsnya. Hal tersebut diduga bahwa adanya ketidaksesuaian antara kompetensi dasar KTSP dengan materi yang tersedia di TIMSS. Sehingga perubahan kurikulum akan disempurnakan dengan adanya kurikulum baru yaitu dalam kurikulum 2013, dimana kompetensi dasar yang tersedia akan tetap berjalan dengan mengikuti standar kompetensi lulusan.

Sekolah Al-khuyu' merupakan Sekolah berbasis pesantren yang menggabungkan seluruh peserta didik dalam menempuh pendidikannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Husnul (2020), "4 tahun usia sekolah pesantren gratis Alkhuyu' SC malang ada di Tengah-tengah masyarakat di Desa Tugurejo Kecamatan Wates". Mengenai hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian pada upaya implementasi kebijakan kurikulum. Para guru dan kepala sekolah sebagai pemegang amanah pendidikan harus memaksimalkan tugasnya dengan upaya dan evaluasi sebagai implementor kurikulum yang berlaku. Tenaga pengajar sekolah harus mendukung penuh kebijakan pemerintah pendidikan tentang kurikulum sekolah, terkhusus sekolah muda Al-khuyu' Kabupaten Blitar agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Bentuk dukungan dan persiapan lebih tenaga pendidik dapat berupa implementasi itu sendiri dengan mempersiapkan diri dalam memahami silabus, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik dan benar, menyiapkan materi/bahan ajar, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan kurikulum yang berlaku, evaluasi implementasi pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk sikap mental untuk implementasi kebijakan kurikulum yang efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Beberapa hal penting pada tenaga pendidik adalah sudah mengikuti pelatihan sosialisasi tentang kebijakan kurikulum yang sedang berjalan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Blitar ataupun Kementerian Agama Kab/Kota Blitar.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khuyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum di Sekolah Al-khuyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar?

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Model pendekatan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan istilah *A Model of the Policy Implementation* (1975). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel- variabel tersebut yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2009) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. (2) Sumber Daya, Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. (3) Karakteristik Agen Pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. (4) Komunikasi antar Organisasi,

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (Agustino, 2020:253) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). (5) Disposisi atau Sikap ara Pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. (6) Lingkungan Sosial dan Ekonomi, Hal terakhir yang perlu dilihat guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang nonkonduktif dapat menjadi sumber masalah dari

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dari enam variabel model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) di atas, aspek yang paling kuat mempengaruhi implementasi kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar adalah aspek sumber daya manusia dimana guru adalah sebagai implementornya. Namun dua aspek lain yakni finansial dan waktu turut mempengaruhi proses implementasi tersebut.

Implementasi Kebijakan Kurikulum

Sebuah kebijakan kurikulum yang telah dikembangkan dan di tetapkan tidak akan memiliki arti nyata apa bila kebijakan tersebut hanya sebatas keluaran yang tidak di implemmentasikan, dalam artian kebijakan kurikulum tersebut yang telah di tetapkan oleh sekolah secara aktual. Dalam implementasi ini, tentu saja harus ada suatu penerapan dari komponen-komponen sekolah yang sangat berpengaruh dalam beberapa faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, faktor budaya masyarakat, dan lain-sebagainya. Berbagai dimensi implementasi kurikulum yang penting untuk dicermati adalah materi kurikulum, struktur organisasi kurikulum, peranan pendidikan, pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai yang berlaku dari pada aspek-aspek yang telah di tentukan.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang utama ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasinya. Pada prinsipnya implementasi ini mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, tujuan, *subject matter*, strategi mengajar dan kegiatan belajar serta evaluasi dan *feedback* (Oemar Hamalik, 2013: 190).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara (interview), dokumentasi dan penelurusan dan online serta keikut-sertaan peneliti dalam menentukan dan menetapkan keabsahan data penelitian dengan beberapa instrumen peelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, kamera dan *tape recorder*.

Obyek penelitian adalah kesiapan guru dalam implementasi kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar dimana guru dituntut untuk bisa merubah *mindset* dari penceramah menjadi fasilitator dan motivator siswa.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah menjelaskan bahwa satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai kebutuhan peserta didik, akademik, sosial budaya dan kebutuhan madrasah. Inovasi dan pengembangan KTSP meliputi struktur kurikulum, beban belajar, desain pembelajaran, muatan lokal dan ekstrkurikuler. Dengan demikian bagi satuan pendidikan yang ingin melakukan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasahny, dapat melakukan inovasi dalam pengembangan KTSP madrasahny. Atas dasar ini dikembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Oleh karena itu para pelaksana kurikulum (para guru) hendaknya mampu menciptakan pembelajaran yang berkarakter qurani. Atas dasar kenyataan tersebut maka pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah AL-KHUSYU', Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, berupaya bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan aktifitas dan kreatifitas anak, berkarakter, efektif, demokratis menentang, menyenangkan, mengasyikkan sehingga bisa mempersiapkan para siswa untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

- a. Standar dan sasaran Kebijakan (Kurikulum)/ Ukuran dan tujuan Kebijakan (Kurikulum)

Standar kebijakan di Sekolah Al-Khusyu' telah memenuhi ketentuan yang berdasarkan peraturan dalam Inovasi Pengembangan Implementasi Kurikulum pada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 tahun 2019.

Sekolah Al-khusyu' sebagai ruang lingkup pelaksana pendidikan berciri khas Islam seperti yang di terangkan Umam sebagai salah satu guru atau pelaksana kebijakan di Al-khusyu' menjelaskan bahwa inti dari pada tujuan Sekolah khusyu' adalah mengedepan Adab Individu

peserta didik sekolah Al-khusyu' tanpa menghilangkan tujuan dan visi misi lainnya. Sebagaimana yang banyak dikutip oleh para penuntut oleh kalangan Muslim pada pepatah arab "*Al-adab fauqol 'ilmi*" yang artinya adab itu lebih tinggi dari pada ilmu. Selain itu kejujuran juga adalah sifat yang harus ditanamkan pada setiap orang khususnya pada calon pemimpin bangsa yang tengah membina pengetahuan dan kepribadiannya di Madrasah Al-khusyu'.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar memiliki tujuan yang jelas dan lebih mengarah pada ranah implementasinya, yaitu Terwujudnya kurikulum Madrasah yang relevan/sesuai dengan/mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan memuat nilai nilai dasar Islam.

a) Sumber daya

Dalam rangka mengaktifkan suatu kebijakan maka Lembaga Pendidikan sekolah Al-khusyu' ini harus memiliki sumber daya yang dapat mendukung untuk penerapan kebijakan KTSP sekolah. Elemen sumber daya memiliki beberapa komponen dalam sebuah implementasi. Mengenai hal ini sumber daya merujuk pada Van Meter dan Van Horn (1975) dimana elemen sumber daya di bagi dalam tiga komponen yaitu, Sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Salah satu penelitian ini ditemukan bahwa Sumber daya manusia yang terarah kepada pelaksana kebijakan masih sangat minim, berbeda dengan finansial yang cenderung meningkat hal tersebut memberikan masukan pada peneliti untuk dilaksakannya perekrutan pelaksana yang berkompeten pada bidangnya, adapun Sumber daya waktu cenderung stabil hal tersebut telah di ukur pada tahap perencanaan kebijakan dalam sumber daya waktu.

b) Karakteristik Agen Pelaksana

Hubungan antar agen Pelaksana dalam pembahasan merupakan bentuk implementasi kerja sama dalam menjaga komitmen birokrasi Lembaga pendidikan pada kebijakan yang ditetapkan. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Sekolah Al-khusyu' yang mengacu pada KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 183 dan 184 tahun 2019 landasan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tenaga pendidik di KEMENAG Kabupaten Blitar. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama

Kabupaten Blitar telah memberikan hak sekolah Al-Khusyu' Kabupaten Blitar dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam dan sosialisasi guna meningkatkan pelayanan pendidikan sekolah Al-Khusyu'.

c) Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi disekolah Al-Khusyu' Kecamatan Wates Kabupaten Blitar bersama organisasi eksternal terjalin dengan baik, hal tersebut terlihat pada wujud dari relasi antar organisasi yang terkait mengenai pelaksanaan program Sekolah Al-Khusyu' dalam mencapai Tujuannya. Pada penelitian ini tampak hasil komunikasi yang baik dilihat dari adanya kontribusi atau keterlibatan organisasi luar dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku, seperti adanya tenaga pelaksana dari organisasi eksternal yang di utus sebagai pelaksana yang mengabdikan dari beberapa pusat lokasi agen pelaksana luar, yaitu Pondok pesantren Darusalam Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren As-salam Kepanjen Kabupaten Malang dan Pondok Pesantren Baitul Qur'an Malang. Selain itu wujud lain tampak dalam bentuk fasilitas yang tersedia. Hal tersebut menunjukkan terjalin komunikasi yang baik pada lembaga pendidikan Al-Khusyu' dengan organisasi-organisasi eksternal.

d) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa sebagian kecil guru atau tenaga pendidik Sekolah Al-Khusyu' sebagian kecil pelaksana masih belum memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut secara menyeluruh atau mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan di Sekolah Al-Khusyu' Kec. Wates Kab. Blitar masih belum merata. Dalam wawancara ringan penulis menarik kesimpulan bahwa beberapa (Agen) Pelaksana masih belum mendapatkan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut sehingga, beberapa diantaranya belum benar-benar memahami maksud dari standar dan isi kebijakan lantaran belum membaca isinya secara mendalam. Diketahui bahwa pergantian atau perekrutan tenaga pendidik cukup sering terjadi dalam masa yang singkat hal tersebut menjadi tolak ukur bahwa adanya kesenjangan pemahaman pada KTSP yang telah di buat oleh Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar.

e) Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Lingkungan Sosial di lokasi penelitian Sekolah Al-khusyu' dapat dikatakan berhasil, dilihat dari penyediaan fasilitas dan layanan yang baik pada masyarakat Desa Tugurejo. Untuk memberikan hak pendidikan anak di sekolah Al-khusyu' penerapan kebijakan pendidikan di Sekolah Al-khusyu' ini memberikan pelayanan yang tak kalah baik dengan pelayanan yang ada di Kota. Dimana untuk menjalankan implementasi kebijakan di Sekolah, salah satu dari tenaga pendidik atau pelaksana memberikan layanan antar jemput bagi peserta didik yang berada dalam lingkungan masyarakat sekitar Sekolah Al-khusyu' Kabupaten Blitar.

Pada kondisi riil atau nyata lokasi Sekolah Al-Khusyu' dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan menunjukkan Pemberdayaan warga Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kabupaten Blitar masih belum Maksimal dimana pelaksanaan telah mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar siswa yang berkualitas dan didukung dengan suasana belajar dan suasana sekolah yang memadai/kondusif/dan menyenangkan.

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum di Sekolah Al-khusyuk Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar

a) Pendukung

1. Kebijakan Pimpinan Pembuat Kebijakan

Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; pimpinan lembaga pendidikan Al-khusyu beserta jajaran stakeholders sekolah membuat rencana sadar yang telah disepakati dalam rapat kerja tahunan hal ini menjadi pendukung dalam pembuatan kebijakan kurikulum yang telah diberlakukan pada tahun 2021 di kabupaten Blitar. Dalam hal tersebut Grayson (1978) "Kurikulum ialah perencanaan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran".

2. Sumber daya finansial

Kebijakan kurikulum Sekolah Al-khusyu' disusun dengan ukuran kapasitas yang potensial terhadap pelaksanaannya, sebagaimana ditemukan dalam penelitian bahwa program kebijakan di sekolah Al-Khusyu' pada sasaran kebijakan yang tidak di tarik biaya sedikitpun, hal tersebut adalah bentuk bahwa lembaga pendidikan Al-khusyu' sangat berpotensi dalam mendistribusikan finansialnya pada sekolah Al-khusyu'. Sejauh penelitian dilaksanakan, program yang dilaksanakan

semakin memberi dorongan lebih oleh stakeholder sekolah dalam mengupayakan layanan dan fasilitas yang layak pada sasaran kebijakan yang telah di tetapkan.

b) Penghambat

1. Sumber daya manusia (Pelaksana)

Dalam hal ini di gambarkan pada hasil penelitian yang di terangkan oleh Heru sebagai Pengurus Tata Usaha Sekolah, bahwa Implementasi yang dijalankan sudah cukup baik namun keterbatasan tenaga pendidik mengakibatkan lemahnya benteng implementasi kebijakan Sekolah Al-Khusyu' Kec. Wates Kabupaten Blitar. Sehingga keterbatasan Tenaga pedidikan menjadi hambatan bagi para implementor kebijakan di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kabupaten Blitar.

2. Mutu Tenaga Pendidik

Mutu pendidikan harus dilihat oleh beberapa hal yakni, proses, hasil dan input. Oleh karena itu dalam konteks pendidikan, mutu pendidikan mencakup *input*, proses dan hasil pendidikan, baik berupa *output* maupun *outcomes* (Nurhadi, 1993: 11)

Penguasaan dan penerapan kompetensi sebagai mana yang diarahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Dimana yang demikian itu sangat menentukan atas tercapainya kualitas proses Implementasi progam-program pembelajaran, pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan atau sesuai dengan fungsi sekolah atau madrasah. Untuk itu perlu perhatian lebih terhadap implementasi kebijakan yang berlaku di sekolah Al-Khusyu' guna memastikan apakah guru atau tenaga pendidik telah melaksanakan tugasnya secara profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan Berdasarkan Penjelasan pada hasil temuan dan pembahasan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada enam variabel Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yakni; Standar dan tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi

- antar Organisasi, Disposisi/ Sikap pelaksana serta Lingkungan sosial dan ekonomi.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA)184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi (Kebijakan) kurikulum pada madrasah.
 3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar adalah formulasi kebijakan, sumber daya finansial serta sarana dan prasarana.
 4. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar adalah sumber daya manusia/pelaksana kebijakan dan konsistensi Implementasi Kebijakan.

Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam memaksimalkan layanan pendidikan di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar. Maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Pada pimpinan Lembaga Pendidikan Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar untuk dapat merekrut tenaga pendidik tetap yang berkompeten sehingga para pelaksana dapat menemukan titik fokus dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban.
2. Pada pelaksana kebijakan Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar, untuk lebih menguatkan komitmen agar tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan selalu terjaga.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.

- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lismina. 2018. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Keputusan Menteri Agama Nomor 184. 2019. *Tentang Implementasi Kurikulum Pada Madrasah*. Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019. Jakarta. Direktorat Jendral Jakarta
- Keputusan Menteri Agama Nomor 183. 2019. *Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah*. Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019. Jakarta. Direktorat Jendral Jakarta
- Dokumen I. 2021. *Tentang Kurikulum MI Al-Khusyu' Madrasah Tahfidhul Qur'an*. Blitar. Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Blitar.